

Perubahan Rezim dan Solusi Dua Negara

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Salah satu tujuan penyerangan Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran menurut Presiden AS **Donald Trump** adalah “perubahan rezim” di Iran. Dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran **Ayatollah Ali Khamenei** dan beberapa petinggi Iran lainnya, maka Presiden Trump meng-klaim bahwa tujuan itu telah tercapai, walau pun pengganti dari Ayatollah Ali Khamenei, **Mojtaba Khamenei**, tidak lain adalah putera almarhum sendiri yang mewarisi segala-galanya dari ayahandanya, termasuk tentunya ideologi yang dianut dan sistem pemerintahan yang akan dijalankan. Dr. **Rizal Mallarangeng**, seorang pakar ilmu politik alumnus Ohio University AS, dalam wawancaranya di salah satu setasiun televisi, mengatakan bahwa perubahan rezim itu bisa membawa Iran ke arah yang lebih baik, jika pemimpin Iran yang baru bisa meniru **Deng Xiao Ping** di China, yaitu melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan yang dipimpinnya. Deng Xiao Ping mewarisi ideologi yang dianut pemerintahan **Mao Ze Dong** sebelumnya, tapi kemudian menempuh jalan yang berbeda dari pendahulunya, sehingga China bisa maju pesat seperti yang kita lihat sekarang. Jika Mojtaba Khamenei dapat mengambil pelajaran dari China, tentu kelak Iran akan maju seperti negara-negara teluk tetangganya, seperti Kuwait, Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bahkan bisa lebih maju lagi. Tentu yang dimaksud “kemajuan” oleh Rizal Mallarangeng adalah kemajuan material, yaitu menjadi negara yang kaya-raya, yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Tapi Rizal Mallarangeng tidak menyebutkan perubahan rezim – yang juga terjadi dengan intervensi AS – di negara-negara Timur Tengah seperti Libya, Irak dan Suriah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perubahan rezim yang terjadi karena intervensi (militer) AS justru menghasilkan kerusakan dan kehancuran yang berkepanjangan.

Perubahan rezim jelas bukan solusi, apalagi bila terjadi dengan berdarah-darah akibat intervensi asing. Berkaca dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sendiri selama 80 tahun lebih kemerdekaannya, juga telah terjadi beberapa kali perubahan rezim. Dimulai dari rezim demokrasi liberal yang berganti menjadi rezim demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1950an dengan PEMILU tahun 1955 dan Dekrit Presiden 1959, kemudian berganti dengan rezim Orde Baru pada tahun 1966 – yang perubahannya berdarah-darah akibat (ditengarai kuat) adanya intervensi asing. Rezim Orde Baru berkuasa selama 32 tahun sampai tahun 1998, digantikan oleh rezim Orde Reformasi, juga dengan perubahan yang berdarah-darah. Dalam kasus Indonesia perubahan rezim ternyata hanya menghasilkan kondisi “*back to square one*”, atau kembali ke titik awal. Tidak maju-maju, makanya

banyak yang meragukan bahwa rezim Orde Reformasi akan membawa negeri ini ke puncak kejayaan Indonesia Emas pada tahun 2045. Pada umumnya memang perubahan rezim tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Akar permasalahan konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah jelas masalah Palestina. Idealnya, konflik di Palestina hanya bisa diselesaikan dengan berdirinya satu negara Palestina yang merdeka dengan ibukotanya di Jerusalem. Tapi realitas yang ada jelas tidak memungkinkan keadaan ideal terjadi dalam waktu dekat ini. Olehnya itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mengusulkan agar dibentuk dua negara sebagai solusi (*two-state solution*) sementara, sebagaimana pernah terjadi dengan Jerman pasca Perang Dunia Kedua, serta Vietnam dan Korea semasa Perang Dingin. Dua negara itu adalah negara Palestina merdeka dengan ibukotanya Jerusalem, dan negara Zionis (bukan Israel, karena Israel adalah nama nabi yang diakui oleh pemeluk agama Yahudi, Kristiani dan Islam) dengan ibukotanya Tel Aviv. Solusi dua negara ini hanya bisa dicapai dengan perundingan dan negosiasi multi-lateral, tanpa melibatkan “biang kerok” persoalan ini, yaitu Israel dan AS. Kecuali jika terjadi perubahan rezim di kedua negara tersebut. Rezim Donald Trump di AS dan Benjamin Netanyahu di Israel yang nyata-nyata “haus darah”, harus terlebih dahulu digantikan dengan rezim-rezim yang lebih ramah (*friendly*) dan moderat, baru diperkenankan ber-partisipasi dalam negosiasi multi-lateral yang menghasilkan solusi dua negara merdeka, yaitu Palestina dan negara Zionis. Terus-terang, harapan kita adalah AS – sebagaimana rencana Presiden Trump – cepat mengundurkan diri keluar dari NATO, kemudian negara-negara NATO dapat menyusun suatu Operasi Rahasia (*covert operation*) untuk menangkap dan menyeret Donald Trump dan Benjamin Netanyahu ke hadapan mahkamah internasional di Den Haag lalu mengadili mereka sebagai penjahat perang.

Gunung Batu, Awal April 2026